

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Periode Berkala : Triwulan II Tahun Anggaran 2023

Tanggal Evaluasi : 03 Juli 2023

Dokumentasi : (terlampir)

Dari hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Pencapaian kinerja sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023				
			Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Capaian Kinerja Triwulan 2	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Capaian Kinerja Triwulan 2	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	a. Persentase aset tetap dengan dokumentasi Legal	99,50%	99,52%	100,02%	99,60%	99,68%	100%	99,85%	99,74%
		b. Persentase Laporan keuangan PD yang sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	a. Nilai SAKIP	-	-	-	-	-	-	A	-
		b. Nilai RB	-	-	-	-	-	-	36,3	-
		c. Nilai IPP	-	-	-	-	-	-	A-	-
		d. Nilai IKM/SKM	90	96,06	107%	90	95,72	106%	90	106%

2) Pencapaian Kinerja Program

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2022			2023				
			Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Capaian Kinerja Triwulan 2	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Capaian Kinerja Triwulan 2	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	-	-	-	-	-	-	80%	-
2	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai ketentuan	a. Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Rancangan	-	-	-	-	-	-	Tepat waktu	-

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

I. SASARAN STRATEGIS

a. Sasaran : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Indikator kinerja Persentase Laporan keuangan PD yang sesuai SAP pada triwulan II Tahun 2023 telah tercapai namun masih terdapat kendala/permasalahan yaitu:

1. Aparatur pengelolaan keuangan daerah belum memahami terkait pengelolaan keuangan daerah, yang terdiri dari:

- a) Penyusunan perencanaan & penganggaran;
- b) Pelaksanaan anggaran;
- c) Penatausahaan keuangan;
- d) Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
- e) Penyusunan laporan keuangan.

2. Belum terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah (SIKSDA) dengan sistem informasi BMD (SIMBMD).

- Indikator kinerja persentase aset tetap dengan dokumentasi legal pada triwulan II tercapai melebihi target yang ditetapkan namun masih terdapat kendala/permasalahan yaitu:

1. Aparatur pengelolaan BMD belum memahami terkait pengelolaan barang milik daerah:

- a) Perencanaan & penatausahaan BMD,
- b) Penggunaan & pemanfaatan BMD,
- c) Pengamanan & pemindahtanganan BMD.

2. Kerjasama pengelolaan aset daerah;

3. Terdapat aset - aset daerah yang belum termanfaatkan;

4. Belum adanya komitmen terhadap pengelolaan dan penertiban aset PSU;

5. Koordinasi dalam proses pensertifikatan;

6. Adanya penolakan proses pensertifikatan aset pemerintah daerah oleh pemerintah desa.

2) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Tindak lanjut dan upaya perbaikan kinerja untuk meningkatkan capaian kinerja atas Persentase Laporan keuangan PD yang sesuai SAP adalah dengan:

1. Pendampingan dan verifikasi penyusunan APBD/PAPBD;

2. Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
 3. Rekonsiliasi pendapatan dan belanja setiap bulan;
 4. Rekonsiliasi laporan keuangan yang dilaksanakan setiap triwulan;
 5. Bimbingan teknis keuangan daerah;
 6. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar integrasi antara SIKSDA dan SIM BMD dapat terwujud;
 7. Pembangunan aplikasi persediaan.
- Tindak lanjut dan upaya perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja atas Persentase aset tetap dengan dokumentasi Legal antara lain:
 - a) Membentuk tim penyelesaian status kepemilikan aset;
 - b) Penelusuran dokumen guna tertib administrasi;
 - c) Intensif berkoordinasi dengan BPN untuk percepatan proses pensertifikatan;
 - d) Sosialisasi proses sertifikasi kepada pemerintah desa dengan bekerjasama dengan Kecamatan dan BPN;
 - e) Memasang papan nama kepemilikan dan tanda batas tanah;
 - f) Monitoring dan evaluasi pensertifikatan tanah;
 - g) Membentuk tim korlap di masing – masing OPD;
 - h) Bimtek pengelolaan barang milik daerah.

b. Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah.

Hasil capaian kinerja untuk sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah” sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dari 4 (empat) indikator sasaran, terdapat 1 (satu) indikator yang telah dilakukan pengukuran yaitu indikator nilai IKM/SKM yang periode pengukuran/penilaiannya setiap semester. Adapun hasil penilaian IKM/SKM ditargetkan dengan nilai 90 (sangat baik) dan terealisasi dengan nilai 95,72 (sangat baik), sehingga capaian kinerja 106%. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang telah tercapai pada triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Teknologi informasi sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat lebih mudah untuk menggunakan jasa layanan;
2. Adanya komitmen pimpinan berikut jajarannya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik;
3. Pengguna jasa yang telah bersedia menjadi obyek survey kepuasan masyarakat, sehingga teknis pengambilan data IKM menjadi lebih mudah dan lancar.

Adapun dalam pencapaian indikator sasaran terdapat beberapa kendala/permasalahan antara lain:

1. Terbatasnya ruang untuk memenuhi standar ruang pelayanan yang baik;

2. Tingkat pemahaman petugas pelayanan belum merata sehingga berpengaruh pada informasi yang diberikan;
3. Kemampuan petugas dalam melayani masyarakat belum merata.

Rencana tindaklanjut guna meminimalisir kendala/permasalahan serta optimalisasi dalam pencapaian sasaran:

1. Pencanaan zona integritas dengan melibatkan lintas sektor;
2. Penataan ulang ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan pengguna layanan;
3. Menyusun template laporan sebagai panduan pegawai dalam penyusunan laporan.

II. SASARAN PROGRAM

- a. Sasaran Program: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Hasil capaian kinerja untuk sasaran program “Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah” dengan indikator Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan belum terealisasi di triwulan II, dikarenakan pelaksanaan survey dilaksanakan pada akhir tahun 2023.

- b. Sasaran Program: Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai ketentuan

Terdapat 1 (satu) indikator sasaran program “Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai ketentuan” yang pengukurannya dilaksanakan pada triwulan II yaitu Persentase realisasi penyaluran belanja transfer dengan target kinerja 80,57% dan terealisasi 45,32% sehingga tercapai 56,25%. Rendahnya capaian kinerja dikarenakan anggaran belanja transfer didalamnya termasuk anggaran untuk belanja tidak terduga yang bersifat penyediaan.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Pengajuan pencairan anggaran (SPP dan SPM) oleh OPD masih menumpuk di akhir triwulan;
2. Pergeseran anggaran sebelum pelaksanaan PAPBD.

Beberapa upaya perbaikan/tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran yang dilaksanakan tiap bulan;
2. Pelaksanaan bimtek pengelolaan keuangan daerah.

- c. Sasaran Program: Pengelolaan barang milik daerah yang sesuai ketentuan

Capaian kinerja untuk indikator sasaran program “Pengelolaan barang milik daerah yang sesuai ketentuan” pada triwulan II terdapat 3 (tiga) indikator dengan capaian 100%, dan terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian 162,39%.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengelolaan barang milik daerah antara lain:

1. Pemanfaatan BMD dalam rangka optimalisasi PAD belum maksimal;

2. Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan dokumen perjanjian;
3. Kompetensi pengelola BMD di OPD yang belum merata;
4. Data BMD di OPD yang kurang akurat.

Beberapa upaya perbaikan/tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan BMD;
2. Melakukan penilaian terhadap objek - objek sewa BMD;
3. Bimtek pengelolaan BMD;
4. Rekonsiliasi laporan BMD;
5. Optimalisasi SIM BMD.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



CHUSNUL INAYAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19720317 199602 2 001